

ABSTRAKSI

Agar dapat mendukung dan mengendalikan aktifitas-aktifitas dalam fungsi penjualan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai badan usaha, maka badan usaha perlu menciptakan sistem pengendalian intern yang memadai yang dihasilkan dari penerapan sistem dan prosedur penjualan kredit yang sesuai dengan badan usaha tersebut. Sistem pengendalian intern yang baik dan memadai dalam sistem dan prosedur penjualan akan dapat melindungi harta badan usaha dari pemborosan, kecurangan dan kerugian lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah sistem dan prosedur penjualan kredit yang telah diterapkan oleh PT. Boma Bisma Indra di Divisi Aneka Jasa Industri ? dan Apakah sistem dan prosedur atas penjualan kredit pada PT. Boma Bisma Indra Divisi Aneka Jasa Industri telah sesuai dengan kaidah sistem pengendalian intern ?, dengan fokus penelitian struktur organisasi dan job deskripsi, sistem dan prosedur penjualan kredit serta distribusi formulirnya.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan objek penelitian adalah PT Boma Bisma Indra (persero) Divisi Aneka Jasa Industri di Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah survey pendahuluan, studi lapangan dan studi kepustakaan. Dalam studi lapangan penulis menggunakan tiga cara, yaitu : observasi, wawancara dan kuisioner serta dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan analisis dan pembahasan diketahui bahwa sistem pengendalian intern dari penerapan sistem dan prosedur penjualan kredit PT Boma Bisma Indra (persero) Divisi Aneka Jasa Industri telah memadai dibeberapa bagian antara lain : adanya pemisahan tanggungjawab fungsional pembuatan formulir pemberitahuan pengiriman dana pelanggan, daftar piutang, surat permintaan pembayaran, faktur dan kuitansi. Dan yang belum memadai antara lain : pemberian wewenang kepada dinas penjualan untuk melakukan otorisasi kredit, tidak adanya bagian yang memberi otorisasi kredit serta perangkapan fungsi penjualan dan pengiriman.